



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS AIRLANGGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUNAIDI KHOTIB
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 510856

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/119 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000		
2. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, WARISAN Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	380.000.000
1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. MOBIL, HONDA HRV RUI 1.5 E PLUS CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	350.000.000
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	312.941.503
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.442.941.503
III. HUTANG	Rp.	759.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.683.941.503

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.